UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMBATALAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA TIMUR MENGENAI JAWABAN ATAS PERMINTAAN IJIN PEMERIKSAAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/B/2017/PT.TUN.SBY)
TOFA HARI SETIADI, Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie , Habib, 2009, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adjie, Habib, Memahami: Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris, 2017, Refika Aditama: Jakarta.

Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Adjie, Habib, 2018, Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparisi dan Akhir Akta Notaris, Duta Nusindo Semarang, Semarang.

Adjie, Habib, 2009, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Ali, Achmad, 2012, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta.

Atmosudirjo , S. Prajudi, 1994, Hukum Adminisrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Basah, Sjachran, 1989, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Press, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2014, Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, M. Yahya Harahap, 2011, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafikaa, Jakarta.

Harahap, Zairin, 2019, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers.

HR, Ridwan, 2018, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Hs, Salim, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Raja Grafindo, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PEMBATALAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA TIMUR MENGENAI JAWABAN ATAS PERMINTAAN IJIN PEMERIKSAAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/B/2017/PT.TUN.SBY)
TOFA HARI SETIADI, Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Kie, Tan Thong, 2007, Studi Notariat beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.

Marbun, S.F., 2003, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan 2, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.

Notodisoerjo, R. Sugondo, 2007, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Notodisoerjo, R. Sugondo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan Di Masa Datang, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Prinst, Darwan, 2002, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sarwono, 2018, Hukum Acara Perdata Teori & Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Sinar Grafika, Jakarta

Sumardjono, Maria S.W., 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 1997, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syamsudin, M., 2007, Operasional Penelitian Hukum, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 1995, Etika Profesi Notaris, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta

Tobing, G.H.S. Lumban, 1983, Peraturan Jabtan Notaris, cet. Ke 2, , Erlangga Jakarta.

Tobing, G.H.S. Lumbun 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Ctk. Kelima, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.

Untung, Budi, 2005, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PEMBATALAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA TIMUR MENGENAI JAWABAN ATAS PERMINTAAN
IJIN PEMERIKSAAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/B/2017/PT.TUN.SBY)
TOFA HARI SETIADI, Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wiyono, R., 2010, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Karya Ilmiah

Arta Yoga, Ida Bagus Gede Surya, 2016, "Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Persetujuan Terhadap Penyidik Bagi Notaris Yang Tersangkut Kasus Pidana Terhadap Akta Yang Dibuatnya", Tesis, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Yudakusuma, Priharti Dewi Damayanti, 2014, "Perkembangan Kewenangan Pemberian Persetujuan Pemeriksaan Notaris Untuk Kepentingan Proses Keadilan", Tesis, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Firmanzah, Octa Jony, 2011, "Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur)", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Repubik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PEMBATALAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH JAWA TIMUR MENGENAI JAWABAN ATAS PERMINTAAN IJIN PEMERIKSAAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 156/B/2017/PT.TUN.SBY)
TOFA HARI SETIADI, Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

D. Jurnal dan Makalah

Dahlan, 2016, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan*, Jurnal ilmu hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Herowati Poesoko, 2016, Pengawasan dan Pembinaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah:implementasi, Tantangan, dan Solusi, Makalah Seminar Regional, Universitas Jember.

E. Dokumen

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 156/B/2017/PT.TUN.SBY